

Analisis Motivasi *Fraud* dengan Pendekatan Teori *Fraud*

Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, Vera Laurence Liang

Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada,

Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau

Email: natalis.christian@uib.ac.id

ABSTRAK

Fenomena kecurangan menjadi ancaman serius bagi perusahaan dengan berbagai bentuk seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Praktik ini dapat merusak integritas dan kepercayaan dalam informasi keuangan perusahaan yang berpotensi menyesatkan para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi motivasi dalam mendorong praktik kecurangan melalui pendekatan teori kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus kualitatif dengan menggunakan data yang bersumber dari dokumen, artikel, dan penelitian relevan. Hasil penelitian mencerminkan bahwa faktor pendorong utama seperti tekanan finansial, peluang dan rasionalisasi tetap menjadi faktor dominan dalam insiden penipuan secara global termasuk di Asia Pasifik dan Indonesia. Di sisi lain juga terdapat faktor lain yang mendorong praktik penipuan yakni kemampuan, arogansi, dan kolusi. Studi ini berkontribusi besar dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika penipuan di tingkat global dan regional, serta implikasinya dalam merancang strategi pencegahan yang tepat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi penipuan sehingga memberikan kontribusi penting terhadap penelitian mengenai penipuan di Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan resiko penipuan, memperkuat pengendalian internal, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kecurangan, Motivasi, Global, Indonesia, Teori Kecurangan

ABSTRACT

The phenomenon of fraud poses a serious threat to companies in various forms such as misuse of assets, corruption and manipulation of financial reports. This practice can damage the integrity and trust in the company's financial information, potentially misleading stakeholders in making decisions. This research aims to identify what motivates encouraging fraudulent practices through a fraud theory approach. This research uses a qualitative case study approach using data sourced from documents, articles and relevant research. The research results reflect that key driving factors such as financial pressure, opportunity and rationalization remain the dominant factors in fraud incidents globally, including in Asia Pacific and Indonesia. On the other hand, there are also other factors that encourage fraudulent practices, namely ability, arrogance and collusion. This study contributes greatly to enriching understanding of the dynamics of fraud at global and regional levels, as well as its implications in designing appropriate prevention strategies. Theoretically, this research provides a better understanding of the factors that influence fraud motivation thereby providing an

important contribution to research on fraud in Indonesia and the Asia-Pacific region. It is hoped that this research can increase awareness of the risk of fraud, strengthen internal controls, and implement more effective preventive measures.

Keyword: *Fraud, Motivation, Global, Indonesia, Fraud Theory*

1. PENDAHULUAN

Dalam era yang terus berkembang, fenomena kecurangan menjadi ancaman yang dapat menimpa perusahaan. Praktik kecurangan seringkali dilakukan untuk memanipulasi data demi memenuhi harapan dan memperbaiki citra perusahaan di mata investor, auditor, dan masyarakat (Christian & Visakha, 2021). Evaluasi baik buruknya perusahaan sering kali didasarkan pada kinerja laporan keuangan yang dipublikasikan, yang mencerminkan aset, liabilitas, serta ekuitas pemegang saham perusahaan (Angelina & Christian, 2022). Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Pentingnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi positif sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Namun, masih terjadi kesalahan material yang bisa mengakibatkan kecurangan dan menyesatkan pengguna informasi akuntansi (Imtikhani & Sukirman, 2021).

Secara umum, kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai praktik yang melibatkan berbagai metode atau strategi yang tidak etis baik itu secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh keuntungan secara dari pihak lain (Aprillia & Muttaqin, 2024; Sayyid, 2013). Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020), kecurangan merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Ini mencakup berbagai tindakan seperti manipulasi data, penggelapan, atau penyalahgunaan posisi untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil survei ACFE (2022), *fraud* dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset) sebesar 86%, *corruption* (korupsi) sebesar 50%, dan *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan) sebesar 9%. Namun, jika berdasarkan analisis yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, ditemukan bahwa kasus kecurangan paling umum di Indonesia adalah korupsi, mencapai 69,9% dari total kasus yang tercatat, atau sebanyak 167 kasus. Selanjutnya, penyimpangan terhadap aset atau kekayaan negara menduduki peringkat kedua dengan persentase 20,9%, atau sebanyak 50 kasus. Sementara itu, kasus penyimpangan terhadap laporan keuangan menyumbang

9,2% dari total kasus yang terdeteksi, dengan jumlah kasus mencapai 22 (ACFE Indonesia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan melalui penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi adalah yang paling umum di Indonesia. Meskipun jumlah kasus kecurangan dalam laporan keuangan lebih sedikit, kasus-kasus seperti ini memerlukan perhatian serius karena berpotensi merusak integritas dan kepercayaan dalam penyajian informasi keuangan sebuah entitas (Ghaisani & Supatmi, 2023).

Di Indonesia, terdapat kasus besar kecurangan, seperti korupsi di PT Timah yang merugikan negara Rp 271 triliun. Mantan pejabat perusahaan menjadi tersangka karena menyetujui perjanjian fiktif yang mengakibatkan kerugian negara (kumparanNEWS, 2024). Selain itu, terdapat juga kasus kecurangan laporan keuangan, yaitu Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia tahun 2018. Pendapatan bersih diklaim sebesar USD 809 ribu, namun dugaan manipulasi membuat dua komisaris menolak menandatangani laporan. Keterlibatan PT Citilink Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi dalam transaksi yang belum terverifikasi menjadi sorotan. Meskipun Mahata Aero Teknologi belum membayar tanggungannya kepada Citilink Indonesia, laporan keuangan yang tidak valid tetap dicatat oleh manajemen (CNN Indonesia, 2019).

Kasus kecurangan seperti yang telah disebutkan menegaskan pentingnya pencegahan, pendeteksian, dan pemahaman terhadap motivasi para pelaku kecurangan. *Corporate fraud* memiliki dampak signifikan dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang salah (Christian, 2022). Hal ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk mencegah kecurangan dengan melibatkan teori-teori *fraud* seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, *Fraud Pentagon*, dan *Fraud Hexagon*. Masing-masing teori tersebut menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan, seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Dengan memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat berdasarkan teori-teori ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko kecurangan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran teori-teori *fraud* dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi kecurangan di perusahaan. Meskipun sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Angelina & Christian, (2022), Christian & Visakha, (2021) yang menganalisis teori *fraud* dalam mendeteksi *fraud* di perusahaan.

Namun, penelitian tersebut terutama berfokus pada penerapan *Fraud Pentagon* tanpa mempertimbangkan kontribusi yang mungkin diberikan oleh teori *Fraud Hexagon*. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: Pertama, bagaimana teori-teori *fraud* dapat membantu mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi kecurangan di perusahaan? Kedua, sejauh mana teori *Fraud Hexagon* berkontribusi dalam memahami pencegahan dan deteksi kecurangan di perusahaan, khususnya di Indonesia? Terakhir, bagaimana kasus kecurangan di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori-teori *fraud* yang diteliti? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman kecurangan di lingkungan perusahaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai motivasi di balik penipuan. Metode penelitian ini melibatkan analisis kasus-kasus yang terjadi dan menganalisa data dari berbagai sumber, seperti dokumen, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang rinci dan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku penipuan serta memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang tepat dan efektif dalam mengatasi fenomena penipuan.

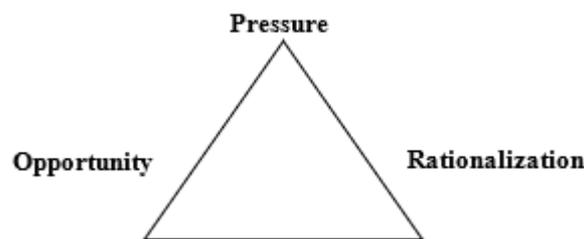
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kecurangan telah diakui menjadi sebuah permasalahan yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam lingkup global. Dalam mengeksplorasi fenomena kecurangan, memahami motivasi para pelaku menjadi hal yang krusial. Salah satu kerangka konseptual yang dapat memberikan pemahaman tentang motivasi di balik kecurangan adalah *Fraud Theory* (Putri & Wilasittha, 2021). Seiring perkembangan zaman, teori ini telah mengalami beberapa kali modifikasi yang awalnya dari *Fraud Triangle Theory* menjadi teori-teori yang lebih kompleks seperti *Fraud Diamond Theory*, *Fraud Pentagon Theory*, hingga menjadi *Fraud Hexagon Theory* (Putri & Wilasittha, 2021). Dengan memahami apa yang mendorong seseorang

untuk melakukan kecurangan, individu atau organisasi dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan yang berdampak cukup serius bagi individu atau organisasi (Hartanto, 2024; Puspasari, 2016).

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory pertama kali diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an, setelah melakukan serangkaian wawancara dengan 250 narapidana korupsi selama periode lima bulan untuk keperluan penelitian (Abdullahi & Mansor, 2015). Dalam penelitiannya ditemukan bahwa para pelanggar kepercayaan bisa membenarkan perilaku tidak etis mereka dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan citra positif tentang diri mereka sendiri (Sujeewa et al., 2018). Kehadiran teori ini memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai dorongan ataupun faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk terlibat dalam praktik kecurangan (Awaliah, 2023).



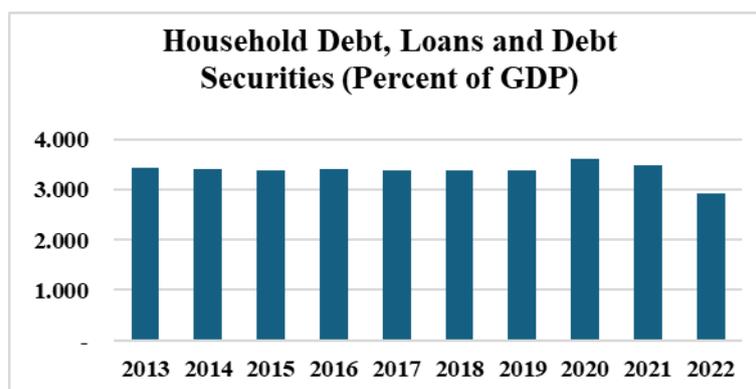
Gambar 1: *Fraud Triangle Model* (Cressey, 1953)

Teori ini menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang saling terkait dalam memahami motivasi pelaku fraud, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Hasil survei PwC (2018) juga telah menguatkan teori ini dengan menunjukkan dominasi faktor peluang yang signifikan dengan kontribusi mencapai 59%. Sementara itu, tekanan juga memainkan peran yang cukup substansial dengan kontribusi sebesar 21%, terutama dalam menghadapi tekanan keuangan atau persaingan dalam organisasi. Meskipun rasionalisasi memainkan peran yang lebih kecil, kontribusinya yang sebesar 11% menunjukkan bahwa proses mental untuk membenarkan tindakan curang masih menjadi faktor penting dalam pemahaman motivasi pelaku *fraud*.

a) Tekanan

Tekanan merupakan faktor yang dapat memicu individu untuk mencari solusi cepat terhadap masalah yang dihadapi, seringkali melalui tindakan yang tidak etis seperti penipuan (Abdullahi & Mansor, 2015; Nakashima, 2017). Para pelaku *fraud* ini merasa bahwa masalah yang sedang dihadapi tidak dapat dipahami oleh orang lain meskipun orang tersebut mungkin memiliki perspektif yang lebih objektif untuk membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi (Abdulrahman, 2019). Fenomena tekanan yang dirasakan seringkali muncul sebagai hasil dari ketidakmampuan untuk secara efisien mengalokasikan atau membagi sumber daya keuangan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang beragam (Abdullahi & Mansor, 2015).

Salah satu bentuk dari tekanan adalah tekanan finansial (keuangan). Tekanan finansial seringkali menjadi pemicu utama bagi seseorang untuk melakukan kecurangan demi mengatasi masalah keuangan yang dialami. Berdasarkan data dari ACFE (2022), tanda-tanda kesulitan keuangan seringkali diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi signifikan dalam perilaku *fraud*. Dalam data tersebut, kesulitan keuangan diidentifikasi sebagai tanda bahaya terbesar kedua, dengan persentase mencapai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan finansial dapat menjadi faktor yang seringkali memainkan peran signifikan dalam perilaku *fraud*.



Grafik 1: Persentase Total Utang Rumah Tangga, Pinjaman, dan Surat Utang Global Terhadap GDP (International Monetary Fund, 2022)

Dalam lanskap ekonomi global, persentase perbandingan total utang rumah tangga, pinjaman, dan surat utang terhadap PDB memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu negara. Namun, di balik angka-angka tersebut, tersembunyi

dinamika yang lebih kompleks, terutama dalam konteks tekanan finansial yang bisa memicu perilaku fraudulensi. Berdasarkan data dari International Monetary Fund (2022), Meskipun persentase ini cenderung menurun dari 2013 hingga 2022, jumlah utang yang tetap besar menimbulkan tekanan finansial yang potensial. Faktor seperti kewajiban pembayaran utang dan beban bunga yang meningkat dapat mendorong praktik fraudulensi, termasuk pemalsuan dokumen dan manipulasi laporan keuangan. Tidak hanya itu, tingginya proporsi utang terhadap PDB terutama di tengah ketidakpastian ekonomi juga dapat mendorong individu untuk mengambil risiko yang lebih besar demi keuntungan yang kemudian memicu perilaku *fraud*.

Tabel 1. Perbandingan Proporsi Penduduk Miskin Kawasan Asia Timur dan Pasifik dan Global

Tahun	Kawasan	
	Asia Timur dan Pasifik	Global
2018	1.575%	8.853%
2019	1.209%	8.920%
2020	1.259%	9.762%
2021	1.231%	9.520%
2022	1.050%	8.978%

Sumber: Data Sekunder, diolah (2024)

Berdasarkan data dari The World Bank (2022), meskipun terdapat tren penurunan proporsi penduduk miskin di kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam rentang waktu 2018-2022, angka tersebut masih mencapai proporsi yang signifikan. Jika disimpulkan secara keseluruhan dalam konteks global, proporsi penduduk miskin menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Tren peningkatan proporsi penduduk miskin dapat menciptakan lingkungan di mana tekanan finansial menjadi alasan yang lebih kuat untuk membenarkan perilaku *fraud*.

Dalam konteks nasional, sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang menempati peringkat ke-4 terbesar di dunia, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan sosial yang signifikan, terutama terkait dengan masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS (2023), populasi Indonesia mencapai 278.696,2 juta jiwa pada pertengahan tahun, dengan pertumbuhan sebesar 1,06% yang mencerminkan peningkatan yang cukup signifikan. BPS (2023) juga melaporkan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang, atau sekitar 9,36 persen dari total

penduduk Indonesia per Maret 2023. Angka ini masih tergolong tinggi berdasarkan standar nasional dan memberikan cerminan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan di negara ini.

Namun tekanan bukan hanya muncul akibat masalah keuangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang ikut berkontribusi dalam menciptakan beban psikologis dan emosional seperti beban kerja tinggi, gaya hidup tidak seimbang, dan lain-lain (Ristianingsih, 2017). Salah satu contoh yang cukup relevan dengan kondisi bisnis saat ini yaitu sistem kompensasi yang sering dikaitkan dengan kinerja. Sistem kompensasi berbasis kinerja dapat mendorong perilaku tidak etis, termasuk manipulasi data atau memberikan tekanan kepada rekan kerja (Sujeewa et al., 2018). Tidak hanya itu, Chandra & Angelina (2023) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa tekanan eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitif juga dapat mendorong mereka untuk melakukan *fraud* melalui manipulasi laporan keuangan.

b) Peluang

Peluang merujuk pada kondisi, celah, dan kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau penipuan tanpa segera terdeteksi atau tanpa risiko yang signifikan (Angelina & Christian, 2022; Puspasari, 2016). Faktor-faktor yang biasanya menyebabkan terciptanya peluang antara lain adalah penyalahgunaan wewenang (Abdulrahman, 2019), kurangnya pengawasan dan pengendalian internal yang lemah atau tidak efektif (Agustin et al., 2022). Misalnya, kurangnya pemisahan tugas dan pengawasan manajerial dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mengeksploitasi aset perusahaan demi keuntungan pribadi. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari luar atau situasi ekonomi sulit juga dapat memperkuat peluang tersebut.

Membahas mengenai efektivitas pengendalian internal, terdapat satu poin yang cukup unik dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut, yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan (Lestari & Jayanti, 2021). Melalui pengawasan ini, dewan komisaris dapat memastikan efektivitas tata kelola perusahaan dan mencegah kecurangan termasuk manipulasi laporan keuangan (Lejab et al., 2024; Sari & Husadha, 2020). Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan dewan komisaris tidak selalu

efektif dalam mengendalikan praktik kecurangan di perusahaan. Hal ini tercermin melalui survei ACFE Indonesia (2020) yang menunjukkan tingkat korupsi yang melibatkan manajemen kunci perusahaan mencapai 64,4%. Manajemen kunci seringkali memanfaatkan posisi dan akses mereka untuk keuntungan pribadi, merugikan perusahaan dan pemegang saham.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus korupsi mantan direktur utama PT Pertamina (Persero) Tbk periode 2009-2014, Karen Agustiawan. Karen dituduh menyalahi prosedur dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) pada 2023, menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 Triliun. Karen dianggap berkontrak dengan perusahaan asing tanpa kajian menyeluruh dan tanpa persetujuan pemerintah, yang mengakibatkan *oversupply* LNG dan kerugian finansial bagi PT Pertamina (Persero) Tbk. Karen juga dianggap tidak melibatkan proses persetujuan yang tepat dari dewan komisaris dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun Karen membantah perbuatannya menyebabkan kerugian negara, Karen telah dinyatakan melanggar hukum, termasuk melanggar peraturan perusahaan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (CNN Indonesia, 2023).

Pengendalian internal yang lemah dapat membuka celah besar untuk praktik kecurangan, seperti yang terjadi pada kasus yang melibatkan mantan direktur utama PT. Pertamina (Persero) Tbk. Ketiadaan mekanisme pengawasan efektif dan persetujuan yang tepat dari dewan komisaris memungkinkan terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan negara. Namun dengan pengendalian internal yang solid, memungkinkan perusahaan untuk identifikasi, pencegahan, dan deteksi awal terhadap segala bentuk perilaku tidak etis yang dapat memengaruhi operasional sebuah perusahaan (Kesumawati & Pramuki, 2021).

c) **Rasionalisasi**

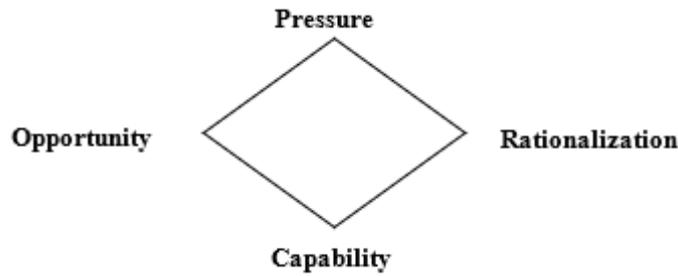
Dalam *fraud triangle theory*, rasionalisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menjelaskan alasan dan potensi terjadinya kecurangan (Puspasari, 2016). Menurut Wells (2018), rasionalisasi merujuk pada proses di mana pelaku *fraud* mencoba meyakinkan diri bahwa tindakan curang atau tidak etis adalah wajar dalam situasi tertentu, membuat mereka merasa sebagai orang jujur yang terjebak dalam keadaan tidak diinginkan. Rasionalisasi ini sering terjadi setelah tindakan kecurangan

telah terdeteksi, dan pelaku mencoba menjaga reputasi mereka atau menghindari konsekuensi negatif dari tindakan mereka.

Rasionalisasi bisa terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di lingkungan kerja di mana tekanan untuk mencapai target atau memenuhi ekspektasi bisa memicu perilaku tidak jujur. Berdasarkan data dari ACFE (2022), pelaku yang melakukan *fraud* biasanya sering dihadapi terhadap masalah-masalah sumber daya manusia (SDM). Masalah sumber daya manusia (SDM) yang disebutkan dalam ACFE disini terdiri dari penolakan kenaikan gaji atau promosi, evaluasi kinerja yang buruk, takut kehilangan pekerjaan, pemotongan tunjangan, pemotongan gaji, kehilangan pekerjaan, pemotongan jam kerja secara paksa, penurunan jabatan. Dari semua masalah diatas, ada tiga masalah yang mengambil porsi kasus tertinggi yaitu ketakutan akan kehilangan pekerjaan sebesar 16% kasus, evaluasi kinerja yang buruk sebesar 15% kasus, serta penolakan kenaikan gaji atau promosi sebesar 12% kasus. Masalah seperti yang disebutkan diatas dapat menjadi pemicu atau faktor yang mendorong pelaku *fraud* untuk merasionalisasi tindakan mereka. Dengan beralasan bahwa dia telah bekerja keras dan membutuhkan imbalan tambahan atau mereka hanya ingin mempertahankan pekerjaan mereka sehingga melakukan manipulasi laporan.

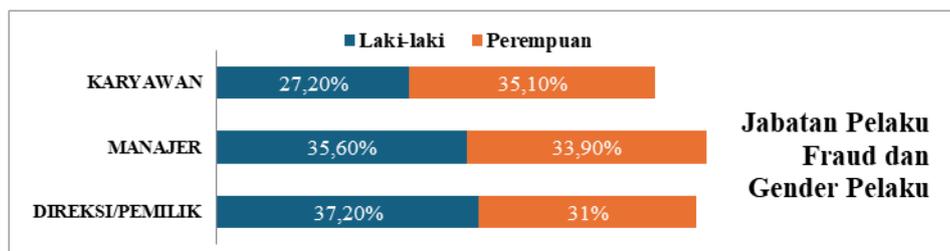
Fraud Diamond Theory

Fraud Diamond Theory adalah pengembangan dari konsep Fraud Triangle yang awalnya diajukan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Konsep ini menambahkan unsur "capability" atau kemampuan sebagai faktor kunci dalam memahami fenomena korupsi atau penipuan. Menurut mereka, kemampuan individu untuk melakukan korupsi juga merupakan faktor kunci dalam memahami fenomena ini. Walaupun seseorang mungkin mengalami tekanan, memiliki kesempatan, dan merasionalisasi tindakan tersebut, namun tanpa kemampuan yang memadai, pelaksanaan korupsi tidak mungkin terjadi.



Gambar 2: *Fraud Diamond Model* (Wolfe & Hermanson, 2004)

Menurut Wolfe & Hermanson (2004), ada 2 hal yang mempengaruhi kemampuan individu dalam melakukan *fraud* diantaranya jabatan & tingkat kecerdasan. Posisi atau jabatan seseorang dalam organisasi dapat memberikan akses atau kesempatan yang lebih besar untuk melakukan *fraud*. Misalnya, seseorang yang memiliki posisi yang tinggi atau memiliki akses ke informasi keuangan dan kebijakan perusahaan akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menciptakan atau memanfaatkan celah dalam sistem untuk melakukan *fraud*. Selain itu, tingkat kecerdasan atau kreativitas seseorang dalam menciptakan skema *fraud* yang rumit atau sulit dideteksi juga mempengaruhi kemampuan. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan atau kreativitas yang tinggi mungkin lebih mampu untuk merencanakan dan melaksanakan *fraud* dengan lebih efektif.



Grafik 2: Perbandingan Jabatan Pelaku *Fraud* Berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia (ACFE Indonesia, 2020)

Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia (2020), kasus korupsi paling tinggi terjadi di posisi manajer, diikuti oleh posisi direksi atau pemilik perusahaan. Ini menunjukkan bahwa korupsi seringkali terjadi di tingkat manajerial dan direksi, mencerminkan proporsi yang signifikan dalam kasus *fraud* di Indonesia. Kemudian, dalam konteks tingkat kecerdasan, menurut hasil survei ACFE Indonesia (2020),

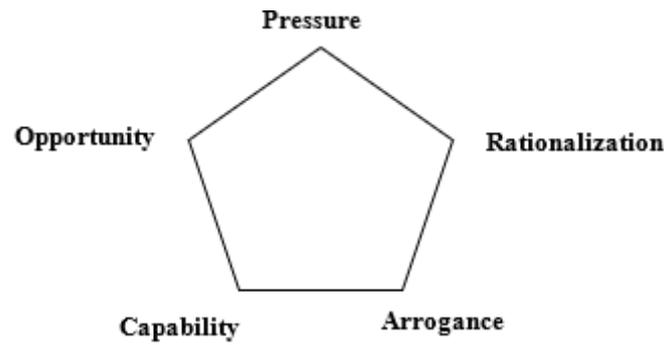
mayoritas pelaku penipuan memiliki tingkat pendidikan tinggi, dengan persentase tertinggi dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi tingkat sarjana dengan persentase 73,2%. Diikuti oleh lulusan perguruan tinggi tingkat master dengan persentase 17,2%, dan lulusan perguruan tinggi tingkat diploma dengan persentase 4,6%.

Salah satu contoh kasus di Indonesia yang mencerminkan faktor Kemampuan pada konsep *fraud* yaitu pada kasus korupsi PT. ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Kronologi kasus korupsi ini berlangsung dari tahun 2012 hingga 2019. Kasus ini dilakukan ketika para pejabat ASABRI berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk melakukan investasi menggunakan dana pensiun milik anggota TNI, Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan. Direktur ASABRI seperti Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja berkomplot dengan pihak eksternal yaitu Benny Tjokrosaputro, Lukman Purnomosidi, dan Heru Hidayat untuk mengendalikan investasi saham dan reksa dana ASABRI. Mereka membeli saham ASABRI dengan harga rendah, lalu menaikkannya untuk menciptakan ilusi kinerja baik, sementara sebenarnya kinerjanya menurun. BPK mencurigai hal ini pada 2020-2021, mengungkap skandal ini dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun.

Dari kasus ini kita bisa ketahui, meskipun para tersangka kasus ASABRI berpendidikan dan berjabatan tinggi, tidak menjamin pemenuhan tanggung jawab sepenuhnya. Mereka diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan dana investasi untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterampilan tidak selalu menjamin integritas, terutama saat motivasi untuk mencari keuntungan pribadi bisa mengalahkan pertimbangan etis dan hukum.

Fraud Pentagon Theory

Fraud Pentagon Theory adalah kerangka konseptual tingkat lanjut untuk memahami dan menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap penipuan, khususnya dalam pelaporan keuangan. Teori ini diperkenalkan oleh Horwath (2011) sebagai perluasan dari teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*. *Fraud Pentagon* menambahkan elemen penting, yaitu arogansi sebagai pembaharuan dari dua teori sebelumnya yang terdiri dari 4 elemen, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan.



Gambar 3: *Fraud Pentagon Model* (Horwath, 2011)

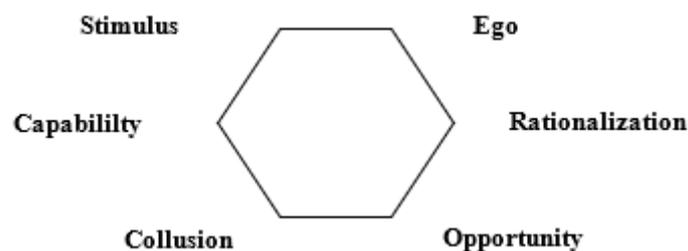
Arogansi adalah sikap yang mengekspresikan keyakinan bahwa kontrol internal, kebijakan, dan peraturan perusahaan tidak berlaku bagi individu tersebut, sehingga mereka merasa terlepas dari kewajiban untuk mematuhi aturan dan prosedur internal perusahaan. Dengan pandangan ini, individu tersebut menganggap dirinya memiliki hak istimewa atau kebebasan untuk mengabaikan kebijakan dan kontrol internal yang berlaku, sehingga merasa tidak bersalah atas tindakan penipuan yang dilakukan (Horwath, 2011). Kesombongan ini muncul karena keyakinan individu akan kemampuannya untuk melakukan kecurangan dan pandangan bahwa sistem kontrol internal tidak akan berpengaruh pada dirinya karena kedudukan dan posisinya. Sebagai akibatnya, pelaku kecurangan melakukan tindakan tersebut tanpa merasa takut akan adanya konsekuensi atau sanksi yang dapat diterimanya (Bawekes et al., 2018; Cahyaningtyas & Achsin, 2018).

Menurut Marks (2012), sebanyak 89% dari kasus penipuan terjadi pada tingkat kepemimpinan tertinggi, yang melibatkan *Chief Executive Officers* (CEO) dan *Chief Financial Officers* (CFO). Sementara itu, sekitar 70% profil pelaku penipuan dipengaruhi oleh kombinasi faktor arogansi dan tekanan individu yang mereka alami. Marks (2012b) juga menyatakan ada beberapa ciri-ciri dari tingkat arogansi seorang pemimpin perusahaan yaitu (1) Kepribadian yang mempunyai ego tinggi dan memiliki persepsi diri sebagai fitur yang dianggap penting atau bisa disebut “*CEO is celebrity*”, (2) Mempunyai anggapan bahwa penerapan pengendalian internal tidak dapat mencegah aktivitas kecurangan yang dilakukannya, (3) Memiliki perilaku yang cenderung sering mengintimidasi bawahan dan/atau rekan kerja, (4) Memiliki gaya manajemen yang otokratis, dan (5) Memiliki ketakutan akan kehilangan kedudukan dan/atau status yang telah diraih.

Beberapa contoh kasus *fraud* yang menunjukkan elemen arogansi dinyatakan dalam buku Biegelman (2013) seperti kasus-kasus besar skandal Enron, WorldCom, dan Tyco. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana eksekutif korporat yang sombong dan rakus merugikan pemegang saham dan karyawan. Mereka sering kali merasa di atas hukum dan mengabaikan tanggung jawab mereka. Bahkan setelah dijatuhi hukuman, kesombongan para penipu masih terlihat. Misalnya, mantan CEO Adelphia John Rigas menyatakan pada sidangnya bahwa ia tidak melakukan apapun selain berusaha memperbaiki kondisi karyawan, namun hakim tidak membelanya dan menjatuhkan hukuman penjara. Kesombongan ini bahkan menjadi dasar dalam strategi pertahanan mereka di pengadilan, meskipun jarang berhasil.

Fraud Hexagon Theory

Teori *Fraud Hexagon* adalah perluasan dari teori-teori kecurangan sebelumnya, seperti *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond*, dan *Fraud Pentagon*. Teori ini disebut juga sebagai *SCCORE's models* yang terdiri dari *Stimulus* (tekanan), *Capability* (kemampuan), *Collusion* (kolusi), *Opportunity* (peluang), *Rationalization* (rasionalisasi), dan *Ego* (arogan). Teori ini diperkenalkan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen baru yang menjadikan elemen keenam yaitu kolusi. *Fraud Hexagon* dipilih karena memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam memahami kecurangan dengan menambahkan elemen baru. Dengan lebih banyak faktor yang diidentifikasi, model ini memberikan gambaran lengkap tentang motivasi dan kondisi yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan, menjadikannya lebih inovatif dibanding teori-teori sebelumnya (Setyono et al., 2023).



Gambar 4: *Fraud Hexagon Model* (Vousinas, 2019)

Menurut Vousinas (2019), kolusi dalam konteks teori *Fraud Hexagon* adalah ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk melakukan tindakan curang atau merugikan

untuk mencapai tujuan yang tidak etis. Vousinas menekankan bahwa adanya kolusi, terutama di antara karyawan atau antara karyawan dengan pihak eksternal, dapat menyulitkan deteksi kecurangan dan mendorong perilaku tidak jujur. Ini dapat mempengaruhi budaya perusahaan secara negatif, memperluas kecurangan, dan membuatnya sulit untuk diperbaiki (Raihan Noval Akbar et al., 2022).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE (2022), sebanyak 58% kasus penipuan melibatkan kolusi antara dua atau lebih pelaku. Kolusi semacam ini seringkali membuat deteksi dan penanggulangan kecurangan menjadi lebih rumit karena melibatkan lebih dari satu individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tidak etis. Oleh karena itu, kesadaran akan risiko kolusi dan implementasi langkah-langkah pencegahan yang efektif sangat penting dalam menjaga integritas perusahaan serta mencegah dampak negatif dari perilaku curang.

Salah satu contoh kasus kecurangan di Indonesia yang berkaitan dengan faktor kolusi adalah kasus dugaan kolusi dalam tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) melibatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON). KPPU menduga adanya persekongkolan tender yang diatur oleh Jakpro untuk memenangkan pelaku usaha tertentu dalam proyek revitalisasi tahap ketiga TIM. Akibatnya, PTPP didenda Rp 16,8 miliar dan JKON Rp 11,2 miliar, sementara Jakpro tidak didenda meskipun terbukti bersekongkol (Naufal, 2023). Kasus ini menunjukkan bagaimana kolusi menghambat persaingan sehat dan adil, serta menyulitkan deteksi dan penanganan kecurangan. Oleh karena itu, perlu sistem pengawasan yang kuat dan budaya integritas untuk mencegah kolusi dan kecurangan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecurangan menjadi semakin rentan terjadi seiring berjalannya waktu. Motif di balik penipuan dapat dijelaskan dengan teori penipuan. Analisis menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, peluang dan rasionalisasi tetap menjadi pendorong utama penipuan di seluruh dunia, serta di kawasan Asia-Pasifik dan Indonesia. Namun terdapat perbedaan motivasi pribadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Tren penipuan di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan sosial. Selain itu, kekuasaan, arogansi, dan

konspirasi dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan penipuan. Jika motivasi penipuan dapat dipahami dengan lebih baik dalam konteks lokal dan regional, maka strategi pencegahan yang lebih efektif dapat dikembangkan. Studi ini menekankan pentingnya perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan meningkatkan kesadaran akan etika dan kejujuran di lingkungan kerja. Pada tataran teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman faktor-faktor pendorong perilaku kecurangan, yang dapat menjadi dasar pengembangan teori dan penelitian di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i3/1823>
- Abdulrahman, S. (2019). Forensic Accounting and Fraud Prevention in Nigerian Public Sector: A Conceptual Paper. *International Journal of Accounting & Finance Review*, 4(2), 13–21. <https://doi.org/10.46281/ijafr.v4i2.389>
- ACFE. (2020). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*, 1–88. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022 : a Report To The Nations*.
- ACFE Indonesia. (2020). *Survey Fraud 2019*.
- Agustin, M. D., Yufantia, F., & Ameraldo, F. (2022). Pengaruh Fraud Hexagon Theory Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Journals of Economics and Business*, 2(2), 47–62. <https://doi.org/10.33365/jeb.v2i2.137>
- Angelina, C., & Christian, N. (2022). Analisis Teori Fraud Pentagon S.C.O.R.E. Method Dalam Mendeteksi Fraud Pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1423–1432. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial Issue 3.1173>
- Aprillia, S. N., & Muttaqin, Z. (2024). Analisis Kepatuhan dan Kinerja Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Fraud pada Perusahaan. 6, 2520–2534. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1381>
- Awaliah, K. N. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1493–1506.

- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M., & Christina Daat, S. (2018). Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 114–134.
- Biegelman, M. T. (2013). *Faces of Fraud*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118556917>
- BPS. (2023a). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)*.
- BPS. (2023b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Cahyaningtyas, I. R., & Achsin, M. (2018). Studi Fenomenologi Kecurangan Mahasiswa Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Mahasiswa: Sebuah Realita Dan Pengakuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 53(9), 1689–1699.
- Chandra, B., & Angelina, V. (2022). *Model Teori Fraud Diamond mempengaruhi Financial Statement Fraud dimoderasi oleh Innovation Strategy*. 17, 234–258. <https://doi.org/10.21009/Wahana.17.027>
- Christian, N. (2022). Efek Mediasi Kesulitan Keuangan dalam Mendeteksi Corporate Fraud di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(1), 44. <https://doi.org/10.33603/jka.v6i1.5576>
- Christian, N., & Visakha, B. (2021). Analisis teori fraud pentagon dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1325–1342.
- CNN Indonesia. (2023). *KPK Sebut Karen Rugikan Negara Rp2,1 Triliun di Korupsi LNG Pertamina*.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*.
- Ghaisani, A. A., & Supatmi, S. (2023). Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Menggunakan Fraud Pentagon. *Owner*, 7(1), 599–611. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1233>
- Hartanto, R. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan*. *March*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10806925>
- Horwath, C. (2011). *Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough*.
- Intikhani, L., & Sukirman, S. (2021). Determinan Fraudulent Financial Statement Melalui Perspektif Fraud Hexagon Theory Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), 96. <https://doi.org/10.24167/jab.v19i1.3654>
- Indonesia, C. (2019). *Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430174733-92-390927/kronologi-kisruh-laporan-keuangan-garuda-indonesia>

- International Monetary Fund. (2022). *Household Debt, Loans and Debt Securities (Percent of GDP)*.
- Kesumawati, L. E., & Pramuki, N. M. W. A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Eksperimen Pada Koperasi Se-Desa Batubulan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 524–543. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1570>
- kumparanNEWS. (2024). *Korupsi Timah Bikin Negara Rugi Rp 271 T, 1 Lagi Eks Direktur PT Timah Tersangka*. <https://kumparan.com/kumparannews/korupsi-timah-bikin-negara-rugi-rp-271-t-1-lagi-eks-direktur-pt-timah-tersangka-22JXHYktrI>
- Lejab, S. B. B., Rahayu, M., & Apri Emarawati, J. (2024). Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Pergantian Auditor terhadap Fraud. *Ikraith-Ekonomika*, 7(2), 193–203. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2.3348>
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2021). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 38–49. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1491>
- Marks, J. (2012a). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. *United States of America: Crowe Horwath LLP*, 1–62.
- Marks, J. (2012b). *Welcome! Why The Fraud Triangle Is No Longer Enough*. Crowe Horwath LLP.
- Nakashima, M. (2017). Can the fraud triangle predict accounting fraud?: evidence from Japan. *Chiba University of Commerce*, 1–37.
- Naufal, M. (2023). *Kasus Dugaan Kolusi Pemenang Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Itu Tudingan Prematur*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/03/16011311/kasus-dugaan-kolusi-pemenang-tender-revitalisasi-tim-jakpro-itu-tudingan?page=all>
- Puspasari, N. (2016). *Fraud Theory Evolution and Its Relevance to Fraud Prevention in the Village Government in Indonesia*. 1(2), 177–188. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15>
- Putri, S. Y., & Wilasittha, A. A. (2021). *Perkembangan Fraud Theory dan Relevansi dalam Realita*. 1(2), 726–735.
- PwC. (2018). Pulling Fraud Out of the Shadows. *Global Economic Crime and Fraud Survey*, 1–30.
- Raihan Noval Akbar, Adam Zakaria, & Rida Prihatni. (2022). Financial Statement Analysis of Fraud With Hexagon Theory Fraud Approach. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(1), 137–161. <https://doi.org/10.21009/japa.0301.09>
- Ristianingsih, I. (2017). Telaah Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud DI Perguruan Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis , 2017*, 128–139.
- Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). Pengungkapan Corporate Governance Terhadap

- Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 46–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i1.108>
- Sayyid, A. (2013). Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya Minimalisasi Kecurangan dan Rekayasa Keuangan). *At-Taradhi*, 4(1). <https://doi.org/10.18592/taradhi.v4i1.94>
- Setyono, D., Hariyanto, E., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2023). Penggunaan Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Owner*, 7(2), 1036–1048. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1325>
- Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Khatibi, A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The New Fraud Triangle Theory - Integrating Ethical Values of Employees. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 52–57.
- The World Bank. (2022). *Poverty & Inequality Indicators*.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wells, J. T. (2018). International Fraud Handbook. In *International Fraud Handbook*. <https://doi.org/10.1002/9781119448709>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.